BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menempati peringkat ketiga dalam hal ukuran setelah Jakarta dan Surabaya. Sebagai salah satu kota terbesar di luar Pulau Jawa, Medan diikuti oleh Kota Makassar. Keberadaan Kota Medan sebagai jalur utama di Indonesia bagian Barat diperkuat dengan adanya Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Kualanamu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Medan juga dikenal memiliki aksesibilitas yang baik, terlihat dari infrastruktur jalan tol dan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan pelabuhan dan bandara. Menariknya, Kota Medan menjadi pelopor pertama dalam integrasi antara bandara dan kereta api di Indonesia.

Gambar 4.1 Peta Kota Medan
Sumber : DISKOMINFO MEDAN 2024

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia merupakan wujud dari keinginan masyarakat Melayu untuk berkumpul, berunding mengenai eksistensi adat dan budaya Melayu, baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, maupun dunia Melayu secara keseluruhan. Masyarakat Melayu menyadari bahwa tanpanya institusi tempat mereka dapat berunding mengenai adat dan budaya, akan mengakibatkan kurangnya dorongan dan inovasi, serta potensi integrasi sosial-budaya yang terbatas. Maka pada tahun 1971, beberapa tokoh adat dan budaya Melayu, terutama di Provinsi Sumatera Utara, secara informal membahas perlunya pendirian institusi ini.

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia adalah wujud dari aspirasi masyarakat Melayu untuk berkumpul, mengadakan diskusi tentang warisan adat dan budaya Melayu, baik secara lokal, di tingkat provinsi, nasional, bahkan dalam skala Dunia Melayu. Kesadaran masyarakat Melayu akan pentingnya memiliki lembaga untuk berdiskusi mengenai warisan adat dan budaya mereka menjadi dorongan yang kuat, karena tanpanya, integrasi sosial dan budaya dapat terhambat. Inilah sebabnya, pada tahun 1971, beberapa tokoh adat dan budaya Melayu, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, mengadakan pembicaraan informal mengenai perlunya pembentukan lembaga tersebut.

Tingkatan pertama adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan mencerminkan hukum alam, seperti hukum bahwa matahari terbit dari timur, air mengalir, api membakar, manusia berakal, dan sebagainya. Tingkatan kedua berkaitan dengan struktur sosial dan kepemimpinan untuk mempertahankan konsistensi dan peradaban manusia.

Gambar 4.2 : Gedung Kesekretariat MABMI Kota Medan
Sumber : Dokumentasi Peneliti tanggal 28 Agustus 2023

Tingkatan ketiga mencakup kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi adat karena diterima secara kolektif oleh suatu kelompok masyarakat dan tingkatan keempat melibatkan aktivitas upacara seperti pernikahan, khitanan, mandi Syafar, dan sebagainya.

Gambar 4.3 : Pataka Logo MABMI
Sumber : http://mabmi.weebly.com

Lambang MABMI memiliki perisai dengan bentuk segi lima. Di dalamnya, ada lingkaran rantai yang mengapit gambar padi dan kapas, sementara kepala layar dengan bendera kuning (lancang kuning) terlihat sedang melintasi lautan biru. Di bawah lingkaran rantai, terdapat tulisan "Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia" dalam aksara Arab Melayu yang melingkar, serta gambar bintang di tengah-tengah lautan.

مجلس العادات بودايا ملايو اندونيسيا

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023, di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan bersama Pak Zaidan, yang merupakan salah satu pengurus MABMI Kota Medan beliau memaparkan bagaimana sejarah terbentuknya MABMI hal tersebut sama juga dipaparkan oleh informan lainnya yaitu Pak Airul,dan Pak Syahril sebagai salah satu pengurus wilayah MABMI Kota Medan.

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) lahir sebagai wujud aspirasi masyarakat Melayu untuk bersatu dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat Melayu, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Kesadaran akan kebutuhan akan lembaga yang memfasilitasi dialog mengenai kekayaan budaya mereka menjadi pendorong utama pendirian MABMI pada tahun 1971. Beberapa tokoh terkemuka, terutama dari Sumatera Utara, seperti H. Raja Syahnan, Tengku Amin Ridwan, Tengku Abunawar Sinar, Tengku Nurdin, Achmad Tahir, dan Tengku Luckman Sinar, bersatu untuk mencetuskan gagasan ini. Dalam perjalanannya, pada tahun 1973, melalui sebuah musyawarah besar, MABMI secara resmi terbentuk dengan Prof. Tengku Amin Ridwan, Ph.D.,

dipercayakan sebagai ketua umumnya. Sebagai tokoh intelektual Melayu, peran Prof. Tengku Amin Ridwan dalam mengembangkan MABMI, terutama dalam bidang seni dan budaya, sangatlah penting dan diakui dalam sejarah organisasi ini. Tengku Amin Ridwan memimpin MABMI dari tahun 1973 hingga 2001. Kemudian, pada tahun 1991, Tengku Luckman Sinar, S.H., mengambil alih kepemimpinan PB MABMI. Dia dikenal sebagai sejarawan terkemuka di kalangan akademisi dan masyarakat umum, serta aktif sebagai penulis sejarah, budaya, dan adat Melayu sejak tahun 1970-an hingga 2000-an. Di bawah kepemimpinannya, MABMI mendirikan dan mengembangkan Lembaga Kesenian MABMI, yang terdiri dari seniman musik dan tari Sumatera Timur seperti Drs. Fadlin, Syainul Irwan, Tengku Syahruwardi, Muhammad Takari, Riri Virzan Putri, Ade Ira Carla, Zulpan Effendi, Syaiful Amri, Leli, dan banyak lagi. Lembaga Kesenian MABMI kemudian resmi menjadi Sinar Budaya Group.

Selama periode ini, Sinar Budaya Group (dulunya LK MABMI) secara rutin berpartisipasi dalam Pesta Gendang Nusantara (PGN) di Kota Melaka, Malaysia, yang diadakan setiap tahun pada pertengahan April untuk memperingati hari jadi Kota Melaka pada tanggal 15 April. Para seniman dari Sumatera Utara yang tergabung dalam Sinar Budaya Group dipercayakan untuk mewakili kegiatan seni budaya dalam acara tersebut, yang menampilkan karya seni baik di dalam maupun di luar negeri selama kepemimpinan Tengku Luckman Sinar.

Gambar 4.4 : PANJI MABMI
Sumber : http://mabmi.weebly.com

Saat ini, masyarakat Melayu Sumatera Utara juga aktif mengadakan Pesta (Pekan) Budaya Melayu di berbagai daerah tingkat dua di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, acara ini telah menjadi bagian dari kalender resmi Pemerintah Sumatera Utara dalam upaya memajukan kebudayaan dan pariwisata daerah tersebut.

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat penelitian dan pengembangan kebudayaan Melayu. Beliau juga mendirikan Lembaga Kesenian MABMI, yang melibatkan berbagai kelompok seni dan seniman Melayu seperti Lia Grup di bawah kepemimpinan Hj. Dahlia Abu Kasim Sinar, Sri Indra Ratu (SIR) dari Kesultanan Deli yang dipimpin oleh Dra. Tengku Sitta Saritsyah, serta banyak seniman lainnya. Di bawah pimpinan Tengku Amin Ridwan, mereka melakukan pertukaran budaya ke berbagai negara, termasuk Malaysia di mana mereka menggelar pertunjukan budaya di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam, Selain itu, bekerja sama dengan lembaga Kesenian USU, tim seni dari MABMI melakukan pertunjukan budaya Melayu dan Sumatera Utara di berbagai negara seperti Australia, Jerman, China, Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya.

Dalam sejarah MABMI, Tengku Amin Ridwan, sebagai seorang intelektual Melayu, telah secara signifikan mengembangkan lembaga budaya ini, terutama

dalam bidang kesenian. Beliau memimpin organisasi ini mulai dari tahun 1973 hingga 2001. Setelah itu, pada tahun 1991, kepemimpinan PB MABMI dipegang oleh Tengku Luckman Sinar, S.H., seorang sejarawan terkenal di kalangan akademisi dan masyarakat umum. Beliau dikenal sebagai penulis produktif mengenai sejarah, budaya, dan adat Melayu dari tahun 1970-an hingga 2000-an. Karya-karyanya, baik berupa buku, makalah, maupun tulisan di media, menjadi referensi penting bagi para ilmuwan yang mempelajari sejarah, kebudayaan, seni, dan sosial terutama terkait budaya Melayu Sumatera Utara. Selain sebagai sejarawan dan peneliti kebudayaan Melayu, terutama Sumatera Utara, Tengku Luckman Sinar juga dikenal sebagai seorang seniman, khususnya dalam bidang musik dan tari Melayu. Beliau mahir memainkan alat musik perkusi untuk berbagai ensambel tradisional Melayu seperti makyong, ronggeng, dan juga bermain dalam band. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian dalam menari berbagai tarian Melayu seperti zapin, inang, serampang dua belas, dan lainnya. Di masa kepemimpinan MABMI di bawah Tengku Luckman Sinar, Lembaga Kesenian MABMI diteruskan dengan melibatkan seniman musik dan tari dari Sumatera Timur. Beberapa di antaranya adalah: Drs. Fadlin, Syainul Irwan, Tengku Syahruwardi, Muhammad Takari, Riri Virzan Putri, Ade Ira Carla, Zulpan Effendi, Syaiful Amri, Leli, dan masih banyak lainnya. Lembaga Kesenian MABMI kemudian diaktenotariskan menjadi Sinar Budaya Group.

Pada masa kepemimpinan Tengku Luckman Sinar, LK MABMI (sekarang dikenal sebagai SBG) secara rutin berpartisipasi dalam Pesta Gendang Nusantara (PGN) yang diadakan setiap tahun di Kota Melaka, Malaysia. Kota Melaka dikelola

oleh pemerintahannya yang awalnya disebut MPMBB (Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah), tetapi kemudian berganti nama menjadi MBMB (Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah) seiring dengan perubahan status kota Melaka. Seniman-seniman anggota LK MABMI dipercayakan untuk mewakili Sumatera Utara dalam menyajikan seni budaya pada acara tersebut, yang biasanya diselenggarakan pertengahan bulan April setiap tahunnya, bersamaan dengan perayaan hari jadi Kota Melaka pada tanggal 15 April.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023, di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan bersama Pak Airul, yang merupakan salah satu pengurus MABMI Kota Medan beliau memaparkan bagaimana sejarah terbentuknya MABMI hal tersebut sama juga dipaparkan oleh informan lainnya yaitu Pak Zaidan dan Pak Syahril sebagai salah satu pengurus wilayah MABMI Kota Medan.

Struktur atau susunan organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Lampiran Surat Keputusan: Nomor: 002/ORG/PB.MABMI/SK/XII/2015 menyangkut Susunan Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indones ia terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Adat, dan Pengurus Besar MABMI. Berikut penuturan dari bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023, di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan :

> “Proses penyusunan struktur kepengurusan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan bahwa struktur tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi dan anggotanya. Proses penyusunan struktur kepengurusan MABMI merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dengan melibatkan anggota, mengikuti prinsip-prinsip demokratis, dan berfokus pada tujuan organisasi, struktur kepengurusan MABMI dapat dirancang untuk mendukung efektivitas organisasi dan mempromosikan partisipasi aktif anggota”.

4.1.1. Kondisi Antropologis Kota Medan

Di Kota Medan, peradaban kebudayaan Melayu tak dapat dipisahkan dari akar historis pendirian kesultanan. Pada awal dekade tahun 1600-an, Kerajaan Haru atau Aru berganti nama menjadi Kesultanan Deli, setelah merdeka dari kekuasaan Kerajaan Aceh pada tahun 1669. Konsensus di kalangan sejarawan, baik dari etnis Melayu maupun dari luar, menegaskan bahwa pendiri kesultanan ini adalah Sri Paduka Gocah Pahlawan. Namun, pergolakan politik pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Deli, dan Kesultanan Serdang terbentuk pada tahun 1723 sebagai hasil dari peristiwa tersebut.

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang berada untuk letak koordinat 3° 30"-3" 43" 111 98° 35° -98° 44' BT dengan luas wilayah sebesar 265, 10 km Kota medan termasuk suatu kota dengan ciri khusus pada Indonesia sebagai kota Multikultur serta bahkan disebut dengan Miniatur Bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat sosial Kota Medan sangat plural yang dapat dilihat oleh aspek suku, ras, dan agama serta status sosial yang membagikan kontribusi yang luar biasa pada dinamika perkembangan Kota Medan.

Beragamnya komposisi masyarakat itu dapat terlihat dari jumlah etnik yang tinggal di Kota Meedan, seperti suku Melayu, Jawa, Kans Simalungun, Minang, Pakpak, Tamil, Toba, dan saki-ska lainnya. Setiap sukunya mengantarkan budaya tiap-tiap daerahnya membuat Kota Medan menjadi kota yang penuh dengan keberagaman yang sangat unik Selain dari beragamnya etnisitas, Kota Medan menawarkan keberagaman dalam agama resmi, mencakup Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lokal

dan non-lokal seperti Parmalim, Pemena Ahmadiyah, dan Saksi Jahowa. Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan memiliki masyarakat yang heterogen, dengan sekitar tiga puluh persen dari total populasi yang mendekati angka 10 juta orang dewasa. Mayoritas masyarakat Melayu, yang umumnya tinggal di daerah pesisir pantai timur, menandai keberadaan kerajaan dan zelfbestuur Melayu seperti Langkat, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Panai, Bilah, Kualuh, dan Kotapinang dalam sejarahnya.

Kerajaan Deli berdiri dari paruh pertama abad ke-17 M hingga pertengahan abad ke-20, saat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun masih ada sebagai kesultanan, perannya sekarang terbatas pada gelar Sultan sebagai pemangku adat. Selama rentang waktu yang panjang tersebut, Kerajaan Deli mengalami naik turun dalam sejarahnya. Dua kali, Deli jatuh ke bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Ketika kekuatan Kerajaan Siak berkembang di Bengkalis, Deli menjadi bagian dari wilayah Siak Sri Indrapura, dan kemudian dijajah oleh Belanda. Terakhir, Deli bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Kerajaan Deli meliputi Kota Medan saat ini, Langkat, Suka Piring, Buluh Cina, dan beberapa daerah kecil lainnya di sekitar pesisir timur Pulau Sumatera.

Di bawah pemerintahan Belanda, wilayah Deli masuk ke dalam Sumatera Timur, tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, Deli menjadi bagian dari Provinsi Sumatera, yang kemudian berkembang menjadi Provinsi Sumatera Utara. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan. Permaisuri Sultan dikenal sebagai Tengku Maha Suri Raja atau Tengku Permaisuri, sedangkan putra mahkota bergelar

Tengku Mahkota. Putra dan putri lainnya hanya dikenal sebagai tengku. Keturunan lainnya dihitung berdasarkan garis keturunan ayah hingga generasi kelima dan juga menggunakan gelar tengku. Sehari-hari, sultan tidak hanya bertugas sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala urusan agama Islam dan kepala adat Melayu. Untuk menjalankan tugasnya, sultan dibantu oleh bendahara, syahbandar (urusan perdagangan), dan para pembantunya lainnya. Sejarah berdirinya Kesultanan Deli dapat dilacak kembali ke Kerajaan Aceh.

Menurut catatan sejarah, seorang Laksamana dari Kerajaan Aceh yang bernama Sri Paduka Gocah Pahlawan, atau dikenal juga sebagai Laksamana Khoja Bintan, memimpin pasukannya dalam perang melawan Kerajaan Haru di Sumatera Timur pada tahun 1612 M. dan berhasil mengalahkan kerajaan tersebut. Pada tahun 1630, Gocah Pahlawan kembali dengan pasukannya untuk mengatasi sisa-sisa kekuatan Haru di Deli Tua. Setelah berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Haru, Gocah Pahlawan diangkat sebagai penguasa wilayah tersebut sebagai wakil resmi Kerajaan Aceh, yang terbentang dari Tamiang hingga Rokan. Dengan dukungan dari Kerajaan Aceh, Gocah Pahlawan berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya di Sumatera Timur dengan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah tersebut. Gocah Pahlawan menikahi Puteri Nang Baluan Beru Surbakti, adik dari Raja Urung (negeri) Sunggal. Sunggal sendiri adalah sebuah daerah Batak Karo yang telah memeluk agama Islam dan memiliki empat Raja Urung Batak Karo yang telah memeluk Islam.

Pada tahun 1630 M, keempat Raja Urung tersebut mengangkat Laksamana Gocah Pahlawan sebagai raja di Deli. Dengan peristiwa tersebut, Kesultanan Deli

secara resmi berdiri, dan Gocah Pahlawan menjadi Raja Deli pertama. Dalam proses penobatan tersebut, Raja Urung Sunggal bertugas sebagai Ulon Janji, yang mengucapkan taat setia dari Orang-Orang Besar dan rakyat kepada raja. Terbentuk pula Lembaga Datuk Berempat, di mana Raja Urung Sunggul menjadi salah satu anggotanya.

Pada tahun 1669, Deli memisahkan diri dari Kerajaan Aceh, mengambil keuntungan dari situasi Aceh yang sedang lemah karena dipimpin oleh seorang ratu perempuan, Ratu Taj al-Alam Tsafiah al-Din. Setelah Gocah Pahalwan wafat, putranya seharusnya menggantikannya sebagai Raja Deli berdasarkan adat Melayu, karena berasal dari pernikahan resmi. Namun, karena masih di bawah umur, posisi Tuanku Umar sebagai pewaris digantikan oleh Tuanku Pasutan. Untuk mencegah konflik saudara, dua Orang Besar Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembal, bersama dengan seorang Raja Urung Batak Timur di wilayah Serdang bagian hulu (Tanjong Merawa), dan seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), mengangkat Tuanku Umar sebagai Raja Serdang pertama pada tahun 1723 M.

Dengan demikian, Kerajaan Serdang terbentuk sebagai pecahan dari Kesultanan Deli. Pada tahun 1780, Deli kembali berada di bawah kekuasaan Aceh. Tidak banyak catatan yang menjelaskan situasi Deli selama lepas dari kekuasaan Aceh. Namun, ketika Sultan Osman Perkasa Alam naik tahta pada tahun 1825, Kesultanan Deli kembali menguat dan merdeka sekali lagi dari Aceh. Daerah-daerah kecil di sekitarnya seperti Buluh Cina, Sunggal, Langkat, dan Suka Piring ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayah Deli. Namun, kemerdekaan Deli dari Aceh tidak berlangsung lama. Pada tahun 1854, Deli kembali ditaklukkan oleh

Aceh, dan Raja Osman Perkasa Alam diangkat sebagai wakil kerajaan Aceh. Setelah Raja Osman meninggal pada tahun 1858, ia digantikan oleh Sultan. Mahmud Perkasa Alam yang memerintah dari tahun 1861 hingga 1873. Di era kepemimpinan Tengku Luckman Sinar, kegiatan kesenian intensif dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

4.1.2. Kondisi Demografi Kota Medan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan, pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2.279.894 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.125.267 jiwa laki-laki dan 1.154.627 jiwa perempuan. Distribusi jumlahnya bisa diperhatikan lewat tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2015	1.091.937	1.118.687	2.210.624
2016	1.101.020	1.128.388	2.229.408
2017	1.110.000	1.137.425	2.247.425
2018	1.118.402	1.145.743	2.264.145
2019	1.125.267	1.154.627	2.279.894

Sumber : Data BPS Kota Medan Tahun 2019

Kota Medan termasuk ke dalam kota yang terkenal dengan keberagaman etnis dan agama di Indonesia Meskipun beragam etnis dan agama, warga Kota Medan tetap konsisten dalam menjaga kerukunan dan perdamaian dikalangan masyarakatnya, meskipun berbeda latarbelakang keyakinan. Berdasarkan data Kementerian Agama Sumatera Utara tahun 2020, penduduk Kota Medan mayoritas

menganut agama Islam sebanyak 1.641.401 jiwa, Protestam 495 141 jiwa, Katolik 309.483 jiwa. Hindu 9.296 jiwa, Buddha 215 315 jiwa, Khonghucu 11.194 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Agama dikota medan

Agama	Jumlah
Islam	1.641.401 Jiwa
Protestan	495.141 Jiwa
Katolik	309.483 Jiwa
Hindu	9.296 Jiwa
Buddha	215. 315 Jiwa
Konghucu	11.194 Jiwa

Sumber: Kementerian Agama Sumatera Utara Tahun 2020

4.2 Peran Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Dalam Melestarikan Budaya Melayu Di Kota Medan

Budaya tidak hanya merupakan simbol, tetapi juga fondasi dari sebuah peradaban. Ketika sebuah budaya mulai memudar dan tidak lagi diperhatikan oleh suatu bangsa, maka peradaban bangsa tersebut berada dalam ancaman kepunahan. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan budaya Melayu di Kota Medan. Berikut adalah beberapa peran yang biasanya dilakukan oleh organisasi tersebut:

a. Bidang Pendidikan

MABMI menggelar pelatihan bertajuk 'Pembinaan Generasi Muda Melalui Agama dan Nilai-nilai Adat'. Acara ini dihadiri peserta dari berbagai tingkatan pendidikan seperti SMP, MTS, MAN, dan SMK di Kota Medan. Fokusnya adalah

terapi narkoba serta pencegahan kenakalan remaja dengan pendekatan ajaran Islam dan perilaku tradisional Melayu. Selain itu, setiap tahun MABMI juga mengadakan acara berbuka puasa bersama di bulan Ramadan di sekolah-sekolah di Kota Medan.

Dalam ranah pendidikan formal, MABMI turut berperan meningkatkan sumber daya budaya Melayu dengan mengembangkan perpustakaan adat, publikasi, dan dokumentasi budaya Melayu di Kota Medan. Mereka juga memperkuat pengajaran budaya Melayu dan adat Istiadat Melayu melalui mata pelajaran muatan lokal di berbagai tingkatan sekolah di Medan. Selain itu, MABMI aktif dalam mensosialisasikan dan mengumpulkan materi kurikulum berbasis Melayu, serta merancang kurikulum Budaya Melayu sebagai bagian dari muatan lokal. Tak hanya itu, mereka juga menciptakan buku-buku seperti 'Pendidikan Kebudayaan Melayu' untuk memperkaya pembelajaran.

b. Bidang Ekonomi

Suatu tugas Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) dalam pengembangan budaya Melayu Medan adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat Melayu setempat. Langkah-langkahnya termasuk pendirian yayasan atau koperasi untuk menggalang dana, dukungan terhadap kegiatan lokal dengan memberdayakan masyarakat Melayu, serta advokasi untuk mempertahankan hak-hak adat atas tanah dan wilayah sebagai sumber pendapatan bagi komunitas adat serta lembaga adat Melayu Medan. MABMI juga berperan dalam memperjuangkan pacung alas atau konvensi untuk masyarakat adat terkait penggunaan tanah dan sungai, baik oleh badan usaha milik negara maupun swasta. Mereka menginisiasi percepatan berbagai kegiatan industri kecil dan rumah tangga untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan dan memperluas seni budaya Melayu Medan. Upaya lainnya termasuk pengembangan seni budaya Melayu Medan untuk mendukung sektor pariwisata, serta usulan untuk mendirikan pasar seni guna mengembangkan seni kerajinan Melayu Medan demi kesejahteraan ekonomi lokal.

c. Bidang Penelitian, Pengkajian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya Melayu Medan

Dalam usaha merinci organisasi dan ragam adat,, serta penghargaan kehormatan, seni budaya, sastra lisan, dan sistem kekerabatan Melayu Medan, terhambat oleh keterbatasan tenaga dan kondisi daerah. Meskipun demikian, telah ada upaya penelitian dan penulisan yang dilakukan untuk menjadi panduan dalam kegiatan pemerintahan, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa buku yang telah diterbitkan mencakup topik seperti:

- Pakaian Adat
- Masakan Tradisional
- hubungan antara adat dan agama

Dalam mendukung pengembangan seni budaya Melayu Medan, kolaborasi dengan instansi terkait dilakukan untuk memperkuat sektor pariwisata. Salah satu kegiatan yang dijalankan adalah Pergelaran event dalam melestarikan budaya termasuk suatu metode yang efektif agar mempromosikan, memperkenalkan, dan mempertahankan warisan budaya kepada masyarakat luas. Mabmi memiliki program berupa event pergelaran budaya melayu dengan fokus tujuannya ialah memperkenalkan budaya melayu ke semua kalangan.

Hal ini dituturkan oleh bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023:

"Ada, seperti festival pergelaran budaya Melayu serumpun pada tanggal 17 mei 2023"

Tentunya pendapat pak syahril diduung dan ditambahkan dengan pendapat dari pak khairul. Berikut pentuturkan Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023:

"ya sama ya dengan apa yang dipaparkan oleh pak syahriil. Tentunya ada, seperti festival pergelaran budaya Melayu serumpun pada tanggal 17 mei 2023, dan kemungkinan kita bakal terus mengadakan event-event pergelaran budaya Melayu kolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan dengan MABMI, maupun awak media dan *sponsorship* guna bersama mensukseskan acara tersebut nantinya".

Berikut adalah beberapa jenis event pergelaran yang dilakukan MABMI dalam upaya pelestarian budaya Melayu:

1. **Festival Budaya**: Festival budaya adalah acara besar yang menghadirkan berbagai aspek budaya seperti tarian tradisional, musik, kuliner, kerajinan, dan pameran seni. Festival ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalami dan mengapresiasi kekayaan budaya secara langsung.
2. **Pertunjukan Seni Tradisional**: Pertunjukan seni tradisional seperti tari-tarian serampang dua belas, tarian *Ahoii* daerah dapat dijadikan sebagai event pergelaran untuk memperkenalkan seni tradisional khas Melayu Deli kepada masyarakat. Pertunjukan ini juga dapat menjadi sarana edukasi yang efektif tentang nilai-nilai budaya dan sejarah Melayu Deli.
3. **Pameran Budaya**: Pameran budaya dapat mencakup berbagai jenis benda seni, artefak, dan artefak budaya lainnya yang memiliki nilai historis dan budaya khazanah Melayu Pameran tersebut bisa membagikan data yang

semakin jauh menyangkut asal-usul serta makna di balik warisan budaya Melayu Deli dikota medan.

4. **Lomba dan Demonstrasi Budaya**: Lomba atau demonstrasi budaya seperti perlombaan memasak tradisional, lomba tari, atau workshop kerajinan tangan dapat menjadi event pergelaran yang menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam praktik budaya tersebut.
5. **Teater atau Drama Budaya**: Pentas teater atau drama budaya dapat digunakan untuk mengangkat cerita-cerita legenda atau mitologi lokal, serta menggambarkan kisah-kisah sejarah yang penting dalam budaya melayu contohnya : Melayu Hang Tuah, Senandung Dayang Derma, Dll.
6. **Pertunjukan Musik Tradisional**: Pertunjukan musik tradisional, seperti lagu-lagu melayu, dapat menjadi bagian dari event pergelaran untuk memperkenalkan dan mempromosikan warisan musik tradisional kepada masyarakat.
7. **Karnaval Budaya**: Karnaval budaya adalah acara yang melibatkan parade kostum tradisional, tarian, musik, dan dekorasi yang mencerminkan keanekaragaman budaya melayu.
8. **Seminar dan Diskusi Budaya**: Selain pergelaran seni dan pertunjukan, event-event berbasis pendidikan seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik juga dapat digunakan untuk mendiskusikan isu-isu terkait pelestarian budaya, sejarah, dan identitas lokal. Untuk seminar dan diskusi lokal MABMI sering berdiaolog dengan seniman dan sejarahwan melayu di TVRI SUMUT melalui program “dendang melayu”

Hal tesebut ditambahkan melalui penuturannya bu atik, Senin, 4 September 2023 :

> "Ada, biasanya kami saling berkoordinasi untuk menyusun rancangan-rancangan event seperti apa yang bertujuan memperkenalkan, menunjukkan khaanah budaya Melayu kepada masyaraat umum dikota medan. Supaya masyarakat kota medan menghetahui bahwasanya budaya melayu tidak kan hilang dan *streotip* anggapan bahwasanya Medan Kota seribu ketua, *HORAS* MEDAN ya dapat dipahmi bahawasanya Kota Medan adalah Tanah Melayu Deli, sehingga masyarakat diluar kota mengenal Medan sebaagai *AHOI* MEDAN".

Melalui pergelaran event-event seperti ini, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam melestarikan budaya Melayu Deli, meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya, dan memperkuat rasa identitas sebagai Etnis Melayu Deli. Event-event ini juga dapat menjadi sarana untuk membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kerjasama antar komunitas dalam menjaga keanekaragaman budaya.

4.3 Tantangan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Dalam Melestarikan Budaya Melayu Di Kota Medan

Setiap komunitas memiliki sistem kebudayaan yang unik. Kebudayaan dalam sebuah masyarakat itu sendiri memiliki sejarah dan evolusi yang berbeda-beda. Seperti makhluk hidup, kebudayaan juga mengalami perkembangan dan transformasi seiring waktu. Tak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan suatu daerah atau kelompok dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Pada dasarnya, kebudayaan sebuah kelompok masyarakat timbul sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan

sekitar. Faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan antara kebudayaan satu wilayah dengan yang lainnya. Namun, melalui interaksi antar kelompok, kebudayaan dapat saling memengaruhi dan mengalami proses penyatuan yang memiliki kemiripan bahkan kesamaan. Hal ini juga didorong oleh proses adaptasi kelompok tersebut ketika berhubungan atau bersosialisasi bersama kelompok lainnya. Proses adaptasi tidak hanya sebatas menyesuaikan diri dengan kondisi geografis, tetapi juga melibatkan interaksi dengan kelompok lain.

Dalam organisasi masyarakat bisa bervariasi tergantung pada jenis organisasi, lingkungan sosialnya, tujuan organisasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Berikut adalah tantangan yang dihadapi organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) pada upaya melestarikan budaya melayu dikota medan :

1. Kepemimpinan Dalam Struktur Organisasi

Salah satu dinamika yang sering terjadi adalah terkait dengan kepemimpinan dan struktur organisasi. Tergantung pada bagaimana kepemimpinan ditetapkan dan struktur organisasi dibangun, bisa muncul konflik kepentingan, ambiguitas peran, atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Berikut penuturan dari bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023, di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan :

> "Dalam proses penyusunan struktur kepengurusan di MABMI, adapun kendala yang dihadapi terdapat perbedaan pandangan pendapat satu dengan yang lain tetapi itu masih hal yang lumrah tidak sampai terjadinya konflik berkepanjangan."

Setelah adanya proses penyusunan struktiur kepengurusn MABMI yang

melibatkan semua anggota MABMI ternyata terdapat perbedaan pandangan pendapat satu dengan pendapat lainnya. Hal tersebut serupa juga dengan penuturan Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023:

> "Dalam proses penyusunan struktur kepengurusan di MABMI, ada ya palingan ketidaksamaan opini antara satu dengan yang lain, dan itu hal yang wajar namanya juga demokrasi bebas mengemukakan pendapatnya. Namun perlu kita akomodir supaya tidak melanggar norma adat melayu selama mubes dilaksanakan".

Peran penting kepemimpinan menjalankan tugas paling utama pada struktur organisasi sebab mempengaruhi budaya, kinerja, inovasi, dan pencapaian tujuan organisasi mabmi, seperti menetapkan visi dan misi organisasi mabmi. Selain itu mengembangkan strategi dan rencana jangka panjang organisasi mabmi untuk mencapai tujuan sebagai wadah pelestari budaya melayu.

2. Konflik Internal

Konflik internal dapat muncul karena perbedaan pendapat, persaingan kepentingan, atau ketidakcocokan antara anggota organisasi mabmi. Konflik semacam ini dapat mengganggu kerja sama dan menghambat pencapaian tujuan organisasi mabmi, terutama dalam proses penyusuan ad/art mabmi. Proses penyusunan AD/ART dapat memunculkan konflik kepentingan antara berbagai pihak di dalam organisasi. Misalnya, anggota yang memiliki kepentingan tertentu mungkin mencoba memasukkan ketentuan yang menguntungkan mereka secara pribadi, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan organisasi secara

keseluruhan ataupun sebaliknya pengurus yang memiliki kepentingan tertentu sehingga mengabaikan kepentingan organisasi dan anggota. Berikut penuturan dari bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023, di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan:

> "Untuk proses penyusunan AD/ART MABMI dilakukan disaat mubes (Musyawara Besar),dimana setelah struktur kepengurusan mabmi terbentuk, kami langsung menyusun rancangan AD/ART"

Dari pemamaparan informan tersebut dapat dipahami bahwa proses penyusunan AD/ART mabmi itu dilakuukan sejalan dengan pembentukan dan pemiliha kepengurusan mabmi. hal ini sejalan dengan penuturan pak Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 :

"Sama halnya dengan pendapat pak syahril Untuk proses penyusunan AD/ART MABMI dilakukan disaat MUBES (Musyawara Besar), dimana setelah struktur kepengurusan MABMI terbentuk, kami langsung menyusun rancangan AD/ART, jadi untuk proses ini tidak ada perbedaan apa yang sudah dipaparkan oleh pak syahril".

Namun proses penyusunan AD/ART mabmi dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat. Hal tersebut didukung oleh penuturan bu atik memaparkan dinamika yang terjadi di organisasi MABMI selama ia menjalani proses penyusunan ad/art mabmi pada tanggal Senin, 4 September 2023 :

> "Untuk proses penyusunan AD/ART saya sebagai anggota ngikutin saja selama proses penyusnan, saya terlibat paling memberikan masukan, sanggahan terkait dengan AD/ART agar berlaku dan dijalankan."

Sehingga dengan adanya satu tujuan dalam penyususunan ad/art membawa mabmi menjadi organisasi yang teguh dalam ikatan silaturahmi etnis melayu.

3. Kendala dalam proses penyusunan Agenda Kerja MABMI

Penyusunan agenda kerja organisasi masyarakat dapat menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi prosesnya. kesulitan menentukan prioritas, perbedaan pendapat dan perspektif merupakan hal yang sering sekali ditemukan dalam melakukan proses penyusunan agenda kerja mabmi. bukan hanya di mabmi saja hampir semua organisasi mengalami problematika tersebut. Sering dihadapkan pada banyak kebutuhan dan masalah yang berbeda. Kesulitan menentukan prioritas dalam agenda kerja dapat menyebabkan penyebaran sumber daya yang terlalu tipis dan kurangnya fokus dalam pencapaian tujuan. Berikut penuturan dari bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023 di kantor pengurus wilayah MABMI Kota Medan :

> "Setelah penyusunan AD/ART MABMI, selanjutnya membahas program kerja semua struktur kepengurusan dan anggota terlibat langsung dalam penyusunan program kerja. Program kerja yang urgent yaitu memperkenalkan MABMI pada masyarakat luas terutama masyarakat etnis melayu yang berada dikota medan. Selain itu, MABMI juga berfokus pada pelestarian budaya Melayu dikota medan dengan kolaborasi pemerintah Kota Medan pada beragam bidang seperti, bidang pendidikan, bidang ekonomi, Bidang Penelitian, Pengkajian serta pengembangan Adat Istiadat serta budaya Melayu".

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting bagi organisasi mabmi untuk melakukan analisis yang cermat tentang kebutuhan dan potensi mereka, melibatkan seluruh pihak yang ikut dalam proses penyusunan agenda kerja, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif di antara semua anggota dan mitra organisasi.

Selain itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan lingkungan eksternal juga merupakan kunci untuk kesuksesan dalam penyusunan agenda kerja organisasi mabmi. Hal tersebut sejalan dengan penuturan Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 :

> "Sama halnya dengan pemaparan pendapat pak syahril nah untuk menyusun program kerja dilakukan setelah penyusunan AD/ART MABMI, selanjutnya membahas Program Kerja semua struktur kepengurusan dan anggota terlibat langsung dalam penyusunan program kerja. Program kerja yang urgent yaitu memperkenalkan MABMI pada masyarakat luas terutama masyarakat etnis melayu yang berada dikota medan. Selain itu, MABMI juga berfokus pada pelestarian budaya Melayu dikota medan dengan kolaborasi pemerintah Kota Medan pada beragam bidang seperti, bidang pendidikan, bidang ekonomi, Bidang Penelitian, Pengkajian serta pengembangan Adat Istiadat serta budaya Melayu. Nah tambahan dari saya terutama saya selaku ketua departemen humas MABMI, saya berusaha melakukan sinergitas dengan organisasi budaya Melayu lainnya seperti Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu (HITPAM)".

Konflik dalam penyusunan agenda kerja dapat muncul karena berbagai alasan, baik itu terkait dengan perbedaan pendapat, kepentingan, maupun prioritas di antara anggota organisasi atau pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengatasi konflik dalam penyusunan agenda kerja, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara seluruh pihak yang ikut. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan juga dapat membantu mengurangi konflik. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan dengan cermat semua perspektif dan mencari solusi yang memperhitungkan kepentingan semua pihak Hal tersebut didukung oleh penuturan bu atik pada tanggal Senin, 4 September 2023 :

> "Sama halnya dengan pemaparan pendapat pak Khairul, Pak Syahril untuk menyusun program kerja dilakukan setelah penyusunan AD/ART MABMI karena apa, AD/ART inilah sebagai landasan kedepannya arah dan tujuan serta tujuan tercapainya Visi-Misi MABMI dan mensukseskan program kerja MABMI dalam upaya mengenalkan budaya Mekayu ke masyarakat umum, serta terlibat langsung dalam upaya pelestarian budaya melayu. Selama saya membahas Program Kerja saya terlibat langsung dalam penyusunan program kerja mengingat departemen humas MABMI berperan besar dalam memperkenalkan, menyebarluaskan serta membagikan informasi terkait dengan kekayaan budaya Melayu ke masyarakat umum. Program kerja yang urgent yaitu memperkenalkan MABMI pada masyarakat luas terutama masyarakat etnis melayu yang berada dikota medan. Selain itu, MABMI juga berfokus pada pelestarian budaya Melayu dikota medan dengan kolaborasi pemerintah Kota Medan pada beragam bidang seperti, bidang pendidikan, bidang ekonomi, Bidang Penelitian, Pengkajian serta pengembangan Adat Istiadat serta budaya Melayu. Nah tambahan dari saya terutama saya selaku anggota departemen humas MABMI, saya berusaha melakukan kontribusi dan menjalankan program kerja yang ada sesuai dengan *Job Description*."

Menyelesaikan konflik dalam penyusunan agenda kerja memerlukan pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif antara anggota dan pengurus mabmi. Dengan adanya pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif antara anggota dengan pengurus mabmi diharapkan konflik dalam penyusunan agenda kerja dapat diselesaikan secara efektif dan membawa organisasi mabmi menuju pencapaian tujuan yang lebih baik.

4. Sinergitas MABMI dengan Pihak Eksternal dalam melestarikan Budaya Melayu

Melestarikan budaya bukan hanya satu orang atau kelompok tetapi merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan beragam pihak suatu pihak yang bertugas utama saat melestarian budaya Melayu dikota medan ialah organisasi

mabmi dan juga pemerintah Kota Medan sebagai kolaborasi sebagai pemerintah kota yang berada di wilayah yang kaya akan budaya Melayu, Pemerintah Kota Medan memperoleh tugas paling utama saat melestarikan dan mempromosikan budaya Melayu. Berikut penuturan dari bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023 :

> "Ada, Sinergitas yang kita bangun melalui MoU kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dengan MABMI"

Kerja sama antara MABMI dan Pemerintah Kota Medan dibangun melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, MSi, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan, Ok Zulfi. MoU tersebut diwujudkan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, yang berlangsung di Hotel Asrama Haji pada Minggu, 29 Desember 2019.

Ok Zulfi menyampaikan bahwa menjaga warisan budaya Melayu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekelompok kecil pengurus, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak. Menurutnya, untuk mencegah budaya Melayu mengalami kepunahan, setiap individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari bangsa Melayu memiliki kewajiban untuk memelihara adat dan budaya Melayu dengan sungguh-sungguh. Pemko Medan Apresiasi Digelarnya Musda VIII MAMBI Medan sebagai bukti adanya sinergitas antara pemerintah Kota Medan dengan MABMI yang bersama melestarikan budaya melayu dikota medan.

Berikut hasil penuturan Pak Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen

HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 :

> "Jelas ada ya Sinergitas yang kita bangun melalui MoU kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dengan MABMI. Mabmi tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri dalam hal upaya melestarikan budaya Melayu dikota medan, mengingat masyarakat Kota Medan yang plural sehingga kita perlu menggandeng, berpangku tangan bersama dalam melestarikan budaya melayu dikota medan"

Kolaborasi bersama dalam melestarikan budaya membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kompetensi yang berbeda guna untuk saling melengkapi dalam hal upaya melestarikan budaya. Hal tersebut didukung oleh penuturan bu atik pada tanggal Senin, 4 September 2023:

> "Jelas ada ya Sinergitas yang kita jalin dam itu biasanya para pengurus besar atau ketua departemen yang terkait untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan terutama instansi terkait"

Melalui kerja sama dan kolaborasi yang kokoh antara berbagai pihak, upaya pelestarian budaya dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan merata. Sinergi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam melestarikan keanekaragaman budaya dan warisan bangsa.

5. Sinergitas Kolaborasi MABMI dengan Pemko Medan

Meskipun sinergitas upaya dalam melestarikan budaya memiliki banyak manfaat, namun seringkali juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Hal ini dijelaskan bapak Syahril dilakukan pada Senin, 28 Agustus 2023. beberapa masalah yang muncul dalam sinergitas antara mabmi dengan pihak Pemko Medan.

> “Umtuk kendala ya ada, salah satu kendala ketika kita mau kolaborasi dengan pemerintah Kota Medan ialah sistem birokrasi yang dipersulit untuk mengadakan pergelaran budaya melayu, selain itu terdapat beberapa penolakan proposal kegiatan MABMI oleh pemerintah Kota Medan”

Sistem birokrasi dalam hal upaya perizinan dalam pergelaran budaya melayu sulit dan harus menunggu waktu yang tak pasti dalam memberikan perizinan kepada mabmi selaku penyelenggara. Selain itu, adanya isu-isu yang mengkaitkan mabmi ikut serta dalam kontestansi dunia perpolitikan tak luput juga menjadi faktor kendala sinergitas mabmi dengan Pemko Medan Hal serupa dituturkan Drs.Khairul Muslim salaku Ketua Departemen HUMAS MABMI pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 :

> “Selanjutnya dinamika sistem birokrasi yang ada di pemko medan terutama mengingat kita sebagai pihak penyelenggara budaya akan menghadapi kendala-kendala seperti harus menunggu waktu yang tak pasti dalam memberikan perizinan, tata kelola yang berkaitan dnegan acara pergelaran melayu serumpun.”

Masalah atau konflik dalam organisasi mabmi seringkali muncul beberapa oknum anggota maupun pengurus karena adanya persaingan kepentingan, ambisi dan lempar tanggungjawab, atau ketidaksepakatan atas visi dan tujuan organisasi. Beberapa anggota mabmi juga tidak ambil pusing adanya dinamika tersebut penuturan bu atik pada tanggal Senin, 4 September 2023 :

> “Kalo itu saya sebagai anggota kurang menghetahui banyak terkait kendala nya, apa yang disampaikan pemaparan pak syahril dan pak khairul karena mereka yang sering ya menjumpai kendala-kendala itu saat berurusan dengan pihak pemko medan”

Untuk mengatasi masalah atau konflik ini, penting untuk mempromosikan

nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan inklusif, proses pengambilan keputusan yang adil, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan sumber daya organisasi juga diperlukan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

6. Kontestasi Politik di MABMI

Isu Politik MABMI dijadikan sebagai kendaraan politik jelak kontestasi politik pemilu tahun 2024, hal tersebut didukung oleh pemaparan informan pak Drs. Khairul Muslim kepada peneliti pada tanggal 31 Agustus 2023 :

> "dinamika isu politik terutama mengingat kita akan menghadapi kontestasi politik pemilu 2024. MABMI tidak boleh dijadikan sebagai kendaran politik dari pihak manapun. Namun, anggota/kader MABMI diperbolehkan berpolitik sebagai politik praktis. Jika ada anggota/kader yang mau ikut berpolitik yah silahkan, MABMI tidak melarng namun yang kami tekankan jangan jadikan MABMI sebagai kendaran politik. Kalau mau politik iitu diluar MABMI, tidak boleh menggunakan atribut berbau MABMI diikut sertakan sebagai kendaran politiknya.''

Menggunakan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) sebagai kendaraan politik dalam kontestasi politik pemilu tahun 2024 merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi integritas dan tujuan sejati organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait isu politisasi MABMI:

A. Integritas Organisasi: MABMI memiliki tujuan utama untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Melayu. Politisasi organisasi seperti ini dapat mengaburkan misi aslinya dan menimbulkan keraguan terhadap motivasi dan integritasnya.

B. Polarisasi dan Konflik: Politisasi MABMI dapat memicu polarisasi dalam masyarakat, terutama jika organisasi tersebut terlibat dalam konflik politik

yang memecahbelah. Hal ini dapat merusak hubungan antar kelompok dan mengganggu stabilitas sosial.

C. Kehilangan Fokus: Mengalihkan perhatian MABMI dari pelestarian budaya ke arena politik dapat mengakibatkan organisasi kehilangan fokus pada tugas utamanya. Ini berpotensi merugikan upaya pelestarian budaya Melayu di Kota Medan.

D. Kredibilitas dan Kepercayaan: Jika MABMI terlibat dalam politik, hal tersebut dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Masyarakat mungkin meragukan apakah keputusan dan tindakan MABMI didasarkan pada kepentingan publik atau motif politik.

E. dan Penyalahgunaan: Politisasi MABMI juga membuka pintu bagi kemungkinan manipulasi dan penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada penggunaan budaya Melayu sebagai alat untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok tertentu.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak negatif ini, penting bagi MABMI dan para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga agar organisasi tersebut tetap independen dan netral dari urusan politik. Memelihara integritas dan fokus pada tujuan utamanya adalah kunci bagi MABMI untuk tetap menjadi agen yang efektif dalam melestarikan dan mempromosikan budaya Melayu di Kota Medan.

Pendekatan yang disampaikan tersebut dapat menjadi langkah yang bijaksana bagi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI). Dengan mengizinkan anggota atau kader untuk berpartisipasi dalam politik di luar MABMI

namun dengan menegaskan bahwa MABMI tidak boleh digunakan sebagai kendaraan politik, organisasi tersebut mempertahankan independensinya dan menghindari terjadinya politisasi yang merugikan.

Menetapkan batasan yang jelas tentang penggunaan atribut berbau MABMI dalam kegiatan politik anggota atau kader juga merupakan langkah yang penting. Hal ini membantu mencegah kebingungan di masyarakat dan melindungi integritas serta reputasi MABMI sebagai organisasi pelestari budaya Melayu yang netral dari urusan politik.

Dengan pendekatan ini, MABMI dapat tetap fokus pada tujuan utamanya dalam melestarikan dan mempromosikan budaya Melayu di Kota Medan tanpa terlibat dalam kontroversi politik yang tidak relevan dengan misi dan visinya.

4.4. Problematika Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Dalam Melestarikan Budaya Melayu Di Kota Medan

Problematika organisasi MABMI mencerminkan adanya masalah ketika melakukan kegiatan dan komitmen mereka dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu dikota medan. Berikut adalah beberapa problematika yang dihadapi oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) dalam upaya melestarikan budaya Melayu di Kota Medan:

1. Struktur Organisasi: Sebagai organisasi yang didirikan untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu, MABMI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, seperti pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Semua komponen memperoleh peran serta

kewajiban pribadi dalam merumuskan serta melaksanakan program-program yang relevan.

2. Keterlibatan Anggota: MABMI menggalakkan partisipasi aktif anggotanya dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan budaya Melayu. Semakin banyak anggota yang terlibat secara aktif, semakin kuat jaringan dan pengaruh MABMI dalam menjaga warisan budaya Melayu.
3. Adaptasi dan Inovasi: Seiring perubahan zaman dan dinamika masyarakat, MABMI perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam penyampaian program dan kegiatan mereka. Penggunaan teknologi dan pendekatan modern dalam menghadirkan kebudayaan Melayu kepada generasi muda merupakan salah satu contoh dinamika dalam organisasi ini.
4. Pendidikan dan Sosialisasi: MABMI memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya Melayu. Melalui seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan edukasi, organisasi ini mengajak generasi muda untuk terus mencintai dan memahami kebudayaan Melayu.
5. Kerja Sama Antarlembaga: MABMI menjalin kerja sama bersama beragam pihak, termasuk pemerintah, organisasi nirlaba, serta lembaga pendidikan, untuk menciptakan sinergi dalam upaya pelestarian budaya Melayu. Dukungan finansial, SDM, dan kebijakan dari berbagai pihak sangat penting demi kelangsungan kegiatan MABMI.
6. Promosi dan Pengembangan Kreativitas: Dalam menghadapi globalisasi dan urbanisasi, MABMI harus terus mengembangkan kreativitas dalam

menghadirkan budaya Melayu kepada masyarakat. Mempromosikan seni, tari, musik, dan bahasa Melayu melalui kegiatan-kegiatan yang atraktif dan menarik perhatian generasi muda.

7. Dalam menghadapi dinamika yang ada, MABMI harus terus berupaya untuk menciptakan strategi yang efektif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu dikota medan. Keberhasilan MABMI dalam upayanya sangat bergantung pada sejauh mana anggota dan masyarakat luas mendukung dan menjaga warisan budaya Melayu yang mereka cintai.

Kesadaran masyarakat Kota Medan dalam melestarikan dan mengembangkan adat serta budaya Melayu masih belum optimal. Situasi ini menyebabkan adat dan budaya Melayu belum sepenuhnya menjadi 'tuan' di negerinya sendiri. MABMI terus berusaha untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan adat dan budaya Melayu. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh kemajemukan budaya di Kota Medan, seperti budaya Minang, Jawa, dan Batak, yang kadang-kadang mengalahkan kehadiran budaya Melayu. Terdapat juga sikap di kalangan generasi muda Melayu asli Deli yang mungkin merasa enggan atau malu untuk mengakui serta menerapkan kebudayaan Melayu Deli dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan generasi dari suku lain yang lebih konsisten dalam menjaga kebudayaan asli mereka. Dalam konteks ini, terdapat anggapan bahwa tugas untuk menggali, membina,

melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat serta sosial budaya Melayu hanya menjadi tanggung jawab MABMI. Padahal, hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, sesuai dengan komitmen yang telah diatur dalam AD/ART MABMI.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY